**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Sistem Pendidikan Madrasah**
   1. **Ciri-Ciri Pendidikan Islam Masa Pembaruan di Indonesia**

Ada beberapa indikasi pendidikan Islam sebelum dimasuki oleh ide-ide pembaruan yaitu:

1. Pendidikan yang bersifat nonklasikal. Pendidikan ini tidak dibatasi atau ditentukan lamanya belajar seseorang berdasarkan tahun. Jadi seseorang bisa tinggal disuatu pesantren, satu tahun atau dua tahun, atau boleh jadi beberapa bulan saja, bahkan mungkin juga belasan tahun.
2. Mata pelajaran adalah semata-mata pelajaran agama yang bersumber dari kitab-kitab klasik. Tidak diajarkan mata pelajaran umum.
3. Metode yang digunakan adalah metode *sorogan, wetonan, hafalan dan muzakarah.*
4. Tidak mementingkan ijazah sebagai bukti yamng bersangkutan telah menyelesaikan atau menamatkan pelajarannya
5. Tradisi kehidupan pesantren amat dominan dikalangan santri dan kiai. Ciri dari tradisi itu antara lain kentalnya hubungan antara kiai dan santri. Hubungan bathin ini berlanngsung terus sepanjang masa. Kontak-kontak pribadi itulah yang terpelihara sepanjang masa. Santri yang telah menyelesaikan pelajaran disuatu pesantren bisa jadi pindah ke pesantren lain atau mendirikan pesantren baru, namun kontak pribadinya dengan kiai, dimana dia pernah berguru masih tetap terpelihara.[[1]](#footnote-2)

Sekitar abad ke-19, pemerintah Belanda mulai memperkenalkan sekolah-sekolah modern menurut sistem persekolahan yang berkembang di dunia Barat, sehingga hal itu sedikit banyak mempengaruhi sistem pendidikan yang telah berkembang di Indonesia, termasuk pesantren yang menjadi sistem pendidikan madrasah. Sistem sekolah yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda telah memasuki dunia pesantren. Sistem khalaqah bergeser kearah sistem madrasah dalam bentuk klasikal, dengan unit-unit kelas.

Pada perkembangan selanjutnya banyak madrasah yang didirikan terpisah dengan induknya yaitu pesantren, surau, masjid. Bahkan dengan adanya ide-ide pembaruan dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia, tidak sedikit madrasah yang didirikan sudah lepas sama sekali dengan pesantren seghingga tidk hanya memberikan pengethuan agama, tetapi juga mengajarkan pengetahuan umum, sesuai dengan tuntutan zaman. Madrasah yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah Madrasah Adabiyah di Padang Sumatra Barat, yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad 1909.[[2]](#footnote-3)

Menurut Mahmud Yunus sekolah Adabiyah ini adalah sekolah (agama) yang pertama memakai sistem klasikal, berbeda dengan pendidikan disurau-surau yang tidak berkelas, tidak memakai bangku, meja, papan tulis, hanya duduk bersila saja,[[3]](#footnote-4) dan juga madrasah (sekolah agama) yang pertama di Minangkabau, bahkan di seluruh Indonesia. Adabiyah ini berperan sebagai Madrasah sampai dengan tahun 1914 dan pada tahun 1915 telah berubah menjadi HIS.

Steenbirk menyebutkan ada beberapa faktor pendorong bagi pembaruan pendidikan Islam di Indonesia pada permulaan abad kedua puluh yaitu:

1. *“Sejak Tahun 1900, telah banyak pemikiran untuk kembali ke Al-Quran dan Sunah yang dijadikan titik tolak untuk menilai kebiasaan agama dan kebudayan yang ada. Tema sentralnya adalah menolak taklid. Dengan kembali ke Al-Quran dan Sunah mengakibatkan perubahan dalam bermacam-macam kebiasaan agama.*
2. *Sifat perlawanan terhadap penguasa kolonial Belanda*
3. *Adanya usaha-usah dari umat Islam untuk memperkuat organisasinya di bidang social ekonomi*
4. *Banyak orang dan organisasi Islam tidak puas dengan metode tradisional dalam mempelajri Quran dan studi agama, sehingga mereka merasa perlu untuk mengadakan pembaruan pendidikan Islam”.*[[4]](#footnote-5)

Dipandang dari sudut masuknya ide-ide pembaruan pemikiran Islam ke dunia pendidikan, setidaknya ada tiga hal yang perlu diperbarui, ketiga hal tersebut adalah:

1. Metode yang tidak puas hanya dengan tradisional pesantran saja., tetapi diperlukan metode-metode baru yang lebih merangsang untuk berpikir.
2. Isi atau materi pelajaran sudah perlu diperbarui, tidak hanya mengandalkan mata pelajaran agama semata-mata yang bersumber dari kitab-kitab klasik. Sebab masyarakat muslim sejak awal abad kedua puluh di Indonesia telah merasakan peranan ilmu pengetahuan umum bagi kehidupan individu maupun kolektif.
3. Manajemen. Manajemen pendidikan adalah keterkaitan antara sistem lembaga pendidikan dengan bidang-bidang lainnya di Pesantren.[[5]](#footnote-6)

Ketiga macam ini adalah merupakan tuntutan terhadap kebutuhan dunia pendidikan Islam di kala itu. Dengan demikian, jika ide-ide pembaruan itu diterapkan dalam dunia pendidikan Islam, maka hal tersebut merupakan salah satu jalan menuju perbaikan pendidikan Islam di Indonesia. Umat Islam memandang pendidikan merupakan suatu yang wajib dilaksanakan karena manusia diciptakan memiliki akal untuk berfikir tentang semua ciptaan Allah sehingga dapat meningkatkan derajat manusia dibanding makhluk lain, dalam Al-Qur’an dijelaskan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Imron/3 ayat 191:

Artinya: *“(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka”.*[[6]](#footnote-7)

Kemudian dalam surat Al-Anfal/8 ayat 22 yang berbunyi:

Artinya: *”Sesungguhnya binatang (makhluk) yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah; orang-orang yang pekak dan tuli yang tidak mengerti apa-apapun”.*[[7]](#footnote-8)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada beberapa indikasi terpenting dari pendidikan Islam pada masa pembaruan meliputi:

1. Dimasukkannya mata pelajaran umum ke madrasah.
2. Penerapan sistem klasikal dengan segala kaitaannya.
3. Ditata dan dikelola administrasi sekolah dengan tetap berpegang kepada prinsip manajemen pendidikan.
4. Lahirnya lembaga pendidikan Islam yang baru yang diberi nama dengan madrasah.
   1. **Perkembangan Madrasah**

Lembaga-lembaga pendidikan yang yang terkenal pada zaman klasik adalah: kuttab, masjid dan madrasah. Ada juga yang menyebutkan lembaga tersebut meliputi: maktab/kuttab, aljami’, majelis ilmu atau majelis adab, dan madrasah atau kuliah. Dalam buku *Islamic Education*, Tibwi mencatat, bahwa mula-mula pendidikan Islam mengambil tempat di masjid, kemudian berkembang dengan munculnya maktab atau kuttab, lalu menjadi madrasah, sampai akhirnya muncul dari pengkuan umat Islam universitas tertua di dunia seperti Universitas Al-Azhar di Cairo Mesir.[[8]](#footnote-9)

Kuttab adalah lembaga pendidikan tingkat rendah, tempat belajar, membaca dan menulis Al-Quran. Al-Jami’ maknanya di sini adalah masjid. Masjid telah berfungsi sebagai tempa pendidikan sejak zaman rasulullah SAW. Majelis ilmu atau majelis adab adalah merupakan tempat pertemuan langsung yang dipimpin oleh khalifah. Majelis ini telah tumbuh sejak zaman Umaiyah dan berkembang pada zaman Abbasiyah.

Lembaga berikutnya adalah madrasah, madrasah adalah lembaga pendidikan yang tumbuh setelah masjid. Salah satu faktor yang menyebabkan tumbuhnya madrasah adalah karena masjid-masjid telah penuh dengan tempat-tempat belajar dan hal ini amat mengganggu aktivitas pelaksanaan ibadah shalat. Di samping itu pengetahuan pun telah banyak pula berkembang disebabkan perubahan zaman dan kemajuan peradaban manusia. Karena itu ada di antara mata pelajaran itu untuk mempelajarinya diperlukan tanya jawab, perdebatan dan pertukaran pikiran.

Ada beberapa perbedaan pokok antara masjid dan madrasah di kala itu, yakni di dalam madrasah adanya *iwan* yang dalam istilah sekarang disebut ruang kuliah, disamping itu bagi setiap madrasah adanya asrama-asrama untuk tempat tinggal pelajar. Pada madrasah gurunya diangkat secara resmi oleh pengelola madrasah, sedangkan jumlah muridnya lebih terbatas bila dibandingkan dengan masjid. Sedangkan di masjid murid-murid tidak terbatas, dan guru-guru yang mengajar di masjid tanpa diangkat secara resmi oleh siapa pun.

Di antara madrasah-madrasah yang termasyhur di dunia Islam adalah: Madrasah Nizhamiyah yang didirikan pada tahun 457 H (1065 M), Madrasah Nurudin Zinki, Madrasah Al-Mustanshiriyah didirikan di Bagdad tahun 631 H (1234 M), Madrasah Nuriyah didirikan di Damaskus tahun 563 H (1167 M), dan sejumlah madrasah-madrasah lainnya.[[9]](#footnote-10)

Perkataan madrasah seperti yang disebutkan di atas berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah tempat belajar. Padanan madrasah dalam bahasa Indonesia adalah sekolah lebih dikhususkan lagi sekolah-sekolah agama Islam.[[10]](#footnote-11) Dengan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa madrasah tersebut adalah penekanannya sebagai suatu lembaga yang mengajarkan ilmu-ilmu ke-Islaman. Perkataan madrasah di tanah Arab ditujukan untuk semua sekolah secara umum, akan tetapi di Indonesia ditujukan buat sekolah-sekolah yang mempelajari ajaran-ajaran Islam. Madrasah pada prinsipnya adalah kelanjutan dari sistem pesantren.

Di dunia pesantren terkenal adanya elemen-elemen pokok dari suatu pesantren, yaitu: pondok, masjid, pengajian kitab-kitab klasik, santri dan kiai. Kelima macam elemen itu adalah pilar-pilar dari suatu pesantren. Ini berarti bahwa suatu lembaga pengajian yng telah berkembang hingga memiliki kelima elemen tersbut, akan berubah statusnya menjadi pesantren.[[11]](#footnote-12) Pada sistem madrasah tidak mesti ada pondok, pengajian kitab-kitab klasik. Elemen-elemen yang diutamakan di madrasah meliputi lokal tempat belajar, guru, siswa, dan rencana pelajaran, pimpinan.

Berdasarkan ungkapan di atas dapat dipahami bahwa sistem madrasah mirip dengan sekolah umum di Indonesia. Para siswa tidak mesti tinggal mondok di komplek madrasah, siswa cukup datang ke madrasah pada jam-jam berlangsung pelajaran pada pagi hari atau sore hari. Demikian juga halnya tidak mesti ada masjid di lingkungan madrasah, kalaupun siswa bermaksud melaksanakan sholat, mereka malaksanakannya di musholla. Pengajian kitab-kitab klasik pun tidak diadakan di madrasah. Pelajaran-pelajaran yang akan dipelajari telah tercantum dalam daftar pelajaran yang diuraikan dari kurikulumnya.

Ditinjau dari segi tingkatannya, madrasah dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Tingkat Ibtidaiyah (Tingkat dasar)
2. Tingkat Tsanawiyah (Tingkat Menengah)
3. Tingkat Aliyah (Tingkat Menengah Atas)

Tumbuh dan berkembangnya madrasah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan tumbuh dan berkembangnya ide-ide pembaruan di kalangan umat Islam. Di permulaan abad ke- 20 timbul beberapa perubahan bagi umat Islam Indonesia dengan masuknya ide-ide pembaruan seperti yang telah diuraikan di atas.

Di antara ulama-ulama yang berjasa dalam menggagas tumbuhnya madrasah di Indonesia antara lain Syekh Abdullah Ahmad, pendiri Madrasah Adabiyah di Padang pada tahun 1909. Pada tahun 1915, madrasah ini menjadi HIS Adabiyah yang tetap mengajarkan agama.[[12]](#footnote-13) Kurikulum 1915 tidak meliputi sejarah, bernyanyi dan pendidikan jasmani. Sejarah dianggap sensitive dari segi politik dan untuk bernyanyi dan pendidikan jasmani belum ada guru-guru yang kompeten.[[13]](#footnote-14)

Syekh M. Thaib Umar. Pada tahun 1910 mendirikan Madrasah School di Batu Sangkar. Tiga tahun kemudian madrasah ini ditutup dan baru pada tahun 1918 dibuka kembali oleh Mahmud Yunus dan pada tahun 1923 madrasah ini berganti nama dengan Diniyah School. Pada tahun yang sama Rangkoyo Rahma El Yunusiyah mendirikan Madrasah Diniyah Putri di Padang Panjang.[[14]](#footnote-15) Madrasah Diniyah inilah yang kemudian berkembang di Indonesia, baik merupakan bagian dari pesantren atau surau, maupun berdiri di luarnya.

Di kalangan organisasi Islam pun giat pula melaksanakan pembaruan dalam bidang pendidikan, tercatat di antaranya yang termasyhur adalah Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912. Embrio sistem pendidikan madrasah yang pertama kali dikembangkan Muhammadiyah adalah sekolah menengah yang diberi nama *Al-Qismul Arqa*, yang didirikan pada tahun 1918. Bentuk sekolah ini berawal dari sebuah madrasah sederhana di kediaman KH. Ahmad Dahlan, Kuman Yogyakarta. Pada tahun 1920 madrasah ini berubah menjadi sebuah pondok pesantren yang diberi nama Pondok Muhammadiyah. Akan tetapi karena adanya kebutuhan akan guru yang dirasakan sangat mendesak, maka akhirnya Pondok Muhammadiyah diubah menjadi Sekolah Guru (*Kweek School)* untuk mendidik para calon guru sekolah dasar.[[15]](#footnote-16)

Di Majalengka, Jawa Barat berdiri organisasi Perhimpunan Umat Islam (PUI) didirikan oleh KH. A. halim pada tahun 1917. Pada tahun 1932 dalam satu kongres perserikatan Ulama di Majalengka, Halim mengusulkan agar didirikan sebuah lembaga pendidikan, yang akan mengajarkan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu pengetahuan umum, dan juga dilengkapi dengan pekerjaan tangan, perdagangan, dan pertanian, sesuai dengan bakat masing-masing.

Untuk merealisasi keputusan kongres tersebut maka didirikanlah suatu lembaga pendidikan yang bernama Santri Asrama, dibagi 3 bagian, tingkat permulaan, dasar dan lanjutan. Mata pelajaran yang diajarkan di sini, di samping mata pelajaran agama dan umum juga diajarkan ketrampilan seperti pertanian, pekerjaan tangan (besi dan kayu). Dari sini jelaslah ide halim yang tidak menghendaki seorang muslim mengejar akhirat saja dengan mengabaikan dunia.[[16]](#footnote-17)

Organisasi berikutnya yang juga besar peranannya dalam bidang pendidikan Islam di Sumatra Utara ialah Al-Ittihadiyah. Organisasi ini didirikan pada tahun 1932. sebagaimana halnya dengan organisasi Islam lainnya Al-Ittihadiyah juga bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan. Sejumlah sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar, menengah pertama, dan atas banyak tersebar di Kota Madya Medan, Kabupaten langkat, Kabupaten Deli Serdang dan kabupaten-kabupaten lainnya.

Nahdhatul Ulama yang didirikan pada tahun 1926 oleh KH. Hasyim Asy’ari juga banyak mendirikan madrasah dengan susunan sebagai berikut: Madrasah Awaliyah (2 tahun), Madrasah Ibtidaiyah (3 tahun), Madrasah Tsanawiyah (3 tahun), Madrasah Mulaim Wusta (2 tahun), dan madrasah Mu’allim ‘Ulya (3 tahun).[[17]](#footnote-18)

Madrasah-madrasah yang disebutkan di atas, baik yang dikelola oleh organisasi maupun pribadi, belum menunjukkan keseragaman dari berbagai hal seperti lamanya belajar, jenjang pelajaran dan kurikulum. Dalam perbandingan antar bobot mata pelajaran agama dan umum, juga berbeda antara satu madrasah dengan madrasah yang lainnya, ada yang mencantumkan perbandingan 30:70, 40:60, 50:50, 60:40, 70:30 dalam persentase. [[18]](#footnote-19)

Setelah Indonesia merdeka, maka salah satu di antara Departemen yang terbentuk adalah Departemen Agama sebagai perwujudan dari falsafah hidup bangsa Indonesia yang religius. Departemen Agama didirikan pada tanggal 3 Januari 1946. salah satu bidang garapan Departemen Agama adalah bidang pendidikan agama seperti madrasah, pesantren dan mengurus pendidikan agama di sekolah-sekolah umum.

Dalam rangka upaya meningkatkan madrasah, maka pemerintah melalui Kementerian Agama memberikan bantuan-bantuan kepada madrasah dalam bentuk material dan bimbingan. Untuk itu Kementerian Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1946 dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 7 tahun 1952.

Di dalam peraturan tersebut dicantumkan yang dinamakan madrasah, ialah tempat pendidikan yang diatur sebagai sekolah dan membuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pengajaran. Menurut ketentuan ini juga jenjang pendidikan madrasah terdiri dari:

1. Madrasah rendah, sekarang namanya disebut Madrasah Ibtidaiyah.
2. Madrasah Lanjutan Tingkat Pertama, sekarang disebut namanya dengan Madrasah Tsanawiyah.
3. Madrasah Lanjutan Atas, sekarang disebut dengan Madrasah Aliyah.[[19]](#footnote-20)

Upaya pemerintah selanjutnya untuk meningkatkan status madrasah adalah dengan jalan menegerikan madrasah-madrasah swasta yang didirikan masyarakat, baik berbentuk pribadi maupun organisasi. Tercatat sejumlah ratusan madrasah swasta yang dijadikan madrasah negeri yang meliputi tingkatan ibtidaiyah dengan nama MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri), tingkat Tsanawiyah dengan nama Madrasah Tsanawiyah Agama Islan Negeri (MTsAIN), dan Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAIAIN).[[20]](#footnote-21)

Dalam sejarah perkembangan madrasah di Indonesia tercatat pula bahwa pemerintah pernah mendirikan apa yang disebut Madrasah Wajib Belajar atau MWB. Madrasah ini lama belajarnya 8 tahun, materi pelajaran terdiri dari mata pelajaran agama, umum dan ketrampilan dalam lapangan ekonomi, industri dan transmigrasi.

Tujuan dari madrasah ini adalah agar setamat dari madrasah ini anak didik kembali ke desa untuk berproduksi atau bertransmigrasi dengan swadaya dan ketrampilan yang diperolehnya selama 8 tahun, di madrasah MWB. Kurikulum dari MWB merupakan keselarasan tiga perkembangan, yaitu perkembangan otak dan akal, perkembangan hati atau perasaan, dan perkembangan tangan atau kedekatan/ketrampilan. Dengan demikian pelajarannya meliputi pelajaran untuk pengembangan akal disebut kelompok pelajaran pengetahuan alam, pelajaran untuk pengembangan perasaan dan kemauan atau hati disebut kelompok pelajaran agama, dan pelajaran untuk mengembangkan kecekatan dan ketrampilan tangan disebut kelompok pelajaran kerajinan tangan.[[21]](#footnote-22)

Dalam kenyataan konsepsi Madrasah Wajib Belajar (MWB) tidak berjalan sebagaimana diprogamkan. Ada juga madrasah yang menanamkan dirinya dengan madrasah wajib belajar, tetapi kegiatannya tidak sesuai dengan kurikulum MWB.

* 1. **Dasar Penetapan Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia**

Menurut peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1946 dan peraturan menteri Agama Nomor 7 tahun 1950, madrasah mengandung makna:

* 1. Tempat pendidikan yang diatur sebagai sekolah dan membuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pengajarannya.
  2. Pondok dan pesantren yang memberi pendidikan setingkat dengan madrasah.[[22]](#footnote-23)

Dalam Surat keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri Tahun 1975, Bab I Pasal I, menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan madrasah dalam Keputusan Bersama ini ialah: Lembaga Pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30%, di samping mata pelajaran umum”.[[23]](#footnote-24)

Berdasarkan diktum-diktum di atas, baik Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1946 dan peraturan menteri Agama Nomor 7 tahun 1950 maupun Surat keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri Tahun 1975, dapat dipahami bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran Agama Islam sebagai mata pelajaran pokok atau dasar, di samping itu juga diajarkan mata pelajaran umum.

Periode selanjutnya adalah periode di mana madrasah telah berada di bawah aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan diatur pula oleh Peratuaran Pemerintah yang berkaitan dengan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar. Undang- Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah seperangkat aturan-aturan atau ketentuan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan Nasional.[[24]](#footnote-25)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut merupakan hasil maksimal yang bisa dicapai untuk menjadikan agma dan kebudayaan bangsa sebagai “sendi dari sistem pendiidkan nasional”, dengan kata lain Undang-Undang tersebut merupakan wadah formal terintergrasinya pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional, dan dengan wadah itu, pendidikan Islam mendapatkan peluang dan kesempatan untuk berkembang.[[25]](#footnote-26)

Selanjutnya untuk menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Pemerintah itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Agama masing-masing mengeluarkan surat keputusan. Menteri Agama mengeluarkan Surat keputusan Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah. Selanjutnya Menteri Agama mengeluarkan pula Surat Keputuan Nomor 373 Tahun 1993 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah (MA), dan Surat Keputusan Nomor 374 tahun 1993 tentang Kurikulum Madasah Keagamaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar serta diikuti oleh surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama, dapat diketahui bahwa madrasah adalah sekolah yang berciri khas agama Islam. Berkenaan dengan ini, maka Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah memiliki kurikulum yang sama dengan sekolah pada tingkat dasar dan pendidikan menengah, ditambah dengan ciri keislamannya yang tertuang dalam kurikulum, yaitu memiliki mata pelajaran agama yang lebih dari sekolah.

Fungsi, peranan dan status madrasah secara substansial pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tidak jauh beda dengan kurikulum madrasah pada Undang-Undang Republik Indonesia Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hanya saja dilihat dari yuridisnya, madrasah pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional lebih kuat dan kokoh karena penyebutan nomenklatur madrasah masuk dalam batang tubuh undang-undang, berbeda halnya dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peristilahan madrasah hanya diatur pada Peraturan Pemerintah dan Surat Keputusan Menteri.

Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 1990. Sedangkan perkataan Madrasah Aliyah disebutkan pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 489/U/1992. perkataan madrasah pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dapat ditemukan pada pasal 17 dan 18.[[26]](#footnote-27)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 17 menyebutkan:

“Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat”.[[27]](#footnote-28)

Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 18 menyebutkan:

“Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat”.[[28]](#footnote-29)

1. **Madrasah Berkualitas** 
   * + 1. **Pengertian Kualitas Pendidikan**

Kata kualitas berasal dari bahasa inggris “*Quality*” yang berarti: “kecakapan, jenis, dan mutu.” Atau juga diambil dari bahasa Belanda: “*Kualitet*” yang berarti “jenis”. Dalam bahasa Arab terdapat kata “*Shifatun*” yang berarti “macam”.[[29]](#footnote-30) Arti dasar kualitas menurut Dahlan Al-Barry dalam *Kamus Modern Bahasa Indonesia* adalah “kualitas, mutu, baik buruk barang”,[[30]](#footnote-31) seperti halnya Quraish Shihab yang mengartikan kualitas sebagai “tingkat baik buruknya sesuatu atau mutu sesuatu”.[[31]](#footnote-32) Semua yang Allah ciptakan memiliki kualitas tinggi dan tidak ada yang sia-sia. Sebagaimana dalam Firman Allah Surat At-Tin ayat 4-6 yang berbunyi:

Artinya: *“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya”.*[[32]](#footnote-33)

Menurut Supranta yang dikutip oleh Iffah Rosyidah, kualitas adalah ”sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik”.[[33]](#footnote-34) Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Guets dan Davis dalam bukunya Tjiptono yang juga dikutip oleh Iffah Rosyidah, menyatakan kualitas pendidikan merupakan ”suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”.[[34]](#footnote-35)

Dari berbagai pengertian yang ada, pengertian kualitas pendidikan sebagai kemampuan lembaga pendidikan untuk menghasilkan murid yang lebih baik sangatlah tepat. Dalam pengertian itu terkandung pertanyaan seberapa jauh semua komponen termasuk instrumental disusun sedemikian rupa, sehingga secara sinergis mampu menghasilkan proses, hasil dan dampak belajar yang optimal. Yang termasuk instrumental yang berkaitan langsung dengan menghasilkan murid yang lebih baik adalah: pendidik, kurikulum, iklim pembelajaran, media belajar, fasilitas belajar, dan bahan ajar. Sedangkan yang termasuk potensial adalah mahasiswa dengan segala karakteristiknya seperti: kesiapan belajar, motifasi, latar belakang sosial budaya, bekal ajar awal, gaya belajar, serta kebutuhan dan harapan.

Dari sisi guru, kualitas dapat dilihat secara optimal guru mampu menfasilitasi proses belajar siswa. Menurut Djemari Mardapi yang dikutip oleh Iffah Rosyidah, bahwa:

“Setiap tanaga mengajar memiliki tanggung jawab terhadap tingkat keberhasilan siswa belajar dan keberhasilan guru mengajar. Sementara itu dari sudut kurikulum dan bahan belajar kualitas dapat dilihat dari seberapa luwes dan relevan kurikulum dan bahan belajar mampu menyediakan aneka stimuli dan fasilitas belajar secara berdiversifikasi. Dari aspek iklim pembekajaran, kualitas dapat dilihat dari seberapa besar suasna belajar mendukung terciptanya suasana pembelajaran yang menarik, menantang, menyenangkan dan bermakna bagi pembentukan proesionalitas kependidikan”.[[35]](#footnote-36)

Selain itu kualitas pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan dasar, baik dari segi pengelolaan maupun dari segi pendidikan, yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambahan dan faktor-faktor input agar mendapatkan output yang setinggi-tingginya. Jadi pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dasar untuk belajar, sehingga dapat mengikuti bahkan menjadi pelopor dalam pembaharuan dan perubahan dengan cara memberdayakan sumber-sumber pendidikan secara optimal melalui pembelajaran yang baik dan kondusif.

Pendidikan atau lembaga pendidikan yang berkualitas disebut juga lembaga pendidikan yang berprestasi, lembaga pendidikan yang baik atau sekolah yang sukses, sekolah yang efektif dan yang unggul. Lembaga pendidikan yang unggul dan bermutu itu ialah sekolah yang mampu bersaing dengan siswa di luar sekolah. Juga memiliki akar budaya serta nilai-nilai etika moral (akhlak) yang baik dan kuat.[[36]](#footnote-37) Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu menjawab tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi sekarang dan masa yang akan datang.

Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa kualitas dan mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga dan sistem pendidikan dalam memberdayakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kualitas yang sesuai dengan harapan atau tujuan pendidikan melalui proses pendiidkan yang efektif.

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang menghasilkan lulusan yang berkualitas, yaitu lulusan yang memiliki prestasi akdemik dan non akademik yang mampu menjadi pelopor pembaharuan dan perubahan sehingga mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapinya, baik di masa sekarang atau di masa yang akan datang.

* + - 1. **Kriteria Pendidikan yang Berkualitas**

Untuk menetapkan kriteria pendidikan yang berkualitas terdapat beberapa pendekatan yang digunakan, menurut Hoy Ferguson ada dua, namun menurut Robbi ada tiga pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Pencapaian Tujuan

Maksudnya bahwa dalam menentukan kriteria pendidikan yang berkualitas difokuskan pada tujuan yang hendak dicapai. Dalam perspektif ini tingkat pencapaian kualitas pendidikan ditandai dengan prestasi penguasaannya dalam bidang ketrampilan dasar, ketrampilan tersebut meliputi:

1. Siswa mampu menguasai ketrampilan-ketrampilan dasar
2. Siswa dapat meraih prestasi akadmik semaksimal mungkin pada semua mata pelajaran
3. Adanya evaluasi yang sistematis yang menunjukkan adanya keberhasilan.

Penetapan kriteria pendidikan yang berkualitas menggunakan perspektif ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu:

1. Pendefisinian kriteria keefektifan yang diukur hanya pada satu dimensi yaitu prestasi akademik saja.
2. Pendekatan ini menekankan perhatiannya pada hasil dari pada alat-alat atau proses pendiidkan.
3. keberlangsungan terancam, dan mereka harus mampu mengukur perkembangan pencapaian tujuan.
4. PendekatanProses

Keefektifan sekolah tidak hanya dilihat dari tingkatan pencapaian tujuan, tetapi difokuskan pada proses dan kondisinya yang disebut dengan karakteristik sekolah, yang berupa:

1. Karakteristik internal yang meliputi gaya kepemimpinan, proses komunikasi, sistem supervisi dan evaluasi sistem pembelajaran, dan proses pembuatan keputusan.
2. Karakteristik eksternal yaitu, situasi yang berpengaruh pada pendidikan yang diselenggarakan seperti: kekayaan, tradisi sosio kultural, struktur kekeuatan dan demografi.
3. Pendekatan Respon Lingkungan

Menurut pendekatan ini sekolah dikatakan sukses jika tujuannya dinyatakan secara eksplisit, ditampilkan secara rasional dan bijaksana, diberi kesan yang teratur dan terkontrol, mempunyai struktur dan prosedur yang pantas, memberi pertanggung jawaban dan menampilkan tindakan yang meyakinkan.[[37]](#footnote-38)

Adapun kriteria pendidikan yang berkualitas sesuai dengan alam Indonesia, dengan menggunakan gabungan dari ketiga perspektif di atas adalah sebagai berikut:

1. Sekolah yang mampu mendidik muridnya berkepribadian luhur, bermoral, bertakwa, berwawasan nasional dan kebangsaan.
2. Sekolah yang mampu menanamkan wawasan lingkungan secara komprehensif atas ketrampilan dasar untuk mencapai prestasi akademik berdasarkan kurikulum nasional serta mengambangkan bakat dan minat individu melalui pencapaian prestasi akademik.
3. Sekolah yang mampu menanamkan wawasan lingkungan dan sistem nilai yang merefleksi sosial kultural religius yang khas Indonesia yang bermuatan pada pemahaman konsep diri atau percaya diri
4. Sekolah yang mampu menjalin kelangsungan hubungan kemitraan yang harmonis dan sehat antara kepala sekolah, guru, orang tua murid sehingga timbul pengakuan dan dukungan positif pada diri mereka.
5. Sekolah yang mampu membuktikan kepemimpinan kepala sekolah yang *accountable* secara aministratif dan akademik.
6. Sekolah yang mampu menciptakan iklim yang sehat, bersemangat dan bermotivasi tinggi pada semua komunitas sekolah.
7. Sekolah yang mampu mengembangkan kreatifitas guru dalam mengajar secara kontinue, melalui evaluasi, perubahan dan perbaikan pengajaran.
8. Sekolah yang mampu membangkitkan semangat murid untuk berpartisipasi dan memanfaatkan kompetisi akademik dan non- akademik sebagai sarana manumbuhkan motivasi dan belajar teman-teman sebaya.[[38]](#footnote-39)

Ada beberapa prinsip yang perlu dipegang dalam menerapkan progam mutu pendidikan di antaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu pendidikan menuntut kepemimpinan professional dalam bidang pendidikan.
2. Kesulitan yang dihadapi para professional pendidikan adalah ketidak mampuan mereka dalam menghadapi “kegagalan sistem” yang mencegah meraka dari pengembangan atau penerapan cara atau proses baru untuk memperbaiki mutu pendidikan yang ada.
3. Peningkatan mutu pendidikan harus melakukan loncatan-loncatan. Norma dan kepercayaan lama harus diubah. Sekolah harus belajar bekerja sama dengan sumber-sumber yang terbatas. Para professional pendidikan harus meembantu para siswa dalam mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan guna bersaing di dunia global.
4. Uang bukan kunci utama dalam usaha peningkatan mutu. Mutu pendidikan dapat diperbaiki jika administrator, guru, staf, pengawas, dan pimpinan kantor Diknas mengembangkan sikap yang terpusat pada kepemimpinan, team work, kerja sama, akuntabilitas, dan rekognisi. Uang tidak menjadi penentu dalam peningkatan mutu.
5. Kunci utama peningkatan mutu pendidikan adalah komitmen pada perubahan. Jika semua guru dan staf sekolah telah memiliki komitmen pada perubahan, pimpinan dapat dengan mudah mendorong mereka menemukan cara baru untuk memperbaiki efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan pendidikan. Guru akan mengguankan pendekatan yang baru atau model-model mengajar, membimbing, melatih, dalam membantu perkembangan siswa. Demikian juga staf administrasi, ia akan menggunakan proses baru dalam menyusun biaya, menyelesaikan masalah, dam mengembangkan progam baru.
6. Banyak professional di bidang pendidikan yang kurang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam menyiapkan para siswa memasuki pasar kerja yang bersifat global. Ketakutan terhadap perubahan atau takut melakukan perubahan akan mengakibatkan ketidaktahuan bagaimana mengatasi tuntutan-tuntutan baru.
7. Progam peningkatan mutu dalam bidang komersial tidak dapat dipakai secara langsung dalam pendiidkan, tetapi membutuhkan penyesuaian-penyesuaian dan penyempurnaan. Budaya, lingkungan, dan proses kerja tiap organisasi berbeda. Para professional pendidikan harus dibekali oleh progam yang khusus dirancang untuk menunjang pendidikan.
8. Salah satu komponen kunci dalam progam mutu adalah sistem pengukuran. Dengan menggunakan sistem pengukuran yang memungkinkan para professional pendidikan dapat memperlihatkan dan mendokumentasikan nilai tambah dari pelaksanaan progam peningkatan mutu pendidikan, baik terhadap siswa, orang tua maupun masyarakat.
9. Masyarakat dan manajemen pendidikan harus menjauhkan diri dari kebiasaan menggunakan “progam singkat”, peningkatan mutu dapat dicapai melalui progam yang berkelanjutan tidak dengan progam singkat.[[39]](#footnote-40)

Jerome S. Arcaro yang dikutip oleh Nana Syaodih S. membuat model visual dari sekolah yang menerapkan progam mutu total. Sekolah yang menerapkan mutu total ditopang oleh lima pilar, yaitu:

1. Berfokus pada pengguna
2. Keterlibatan secara total semua anggota
3. Melakukan pengukuran
4. Komitmen pada perubahan
5. Penyempurnaan secara terus menerus.[[40]](#footnote-41)

Pilar-pilar tersebut dibangun di atas keyakinan dan nilai-nilai yang menjadi pegangan dalam pendidikan. Keyakinan dan nilai-nilai tersebut sejalan dengan visi dan misi pendidikan (sekolah), tujuan jangka panjang dan pendek, serta kriteria keberhasilan yang kritis.

* + - 1. **Sistem Pendidikan Nasional Masa Depan**

Menurut H. A. R. Tilaar, Ada empat indikator perkembangan sistem pendidikan nasional yaitu:[[41]](#footnote-42)

* + 1. *Popularisasi Pendidikan*

Seperti telah dijelaskan, pada zaman kolonial pendidikan hanyalah sekelompok hak dari sekelompok kecil masyarakat, sedangkan masyarakat luas boleh dikatakan mendapatkan pendidikan yang sangat terbatas dan diskriminatif atau diserahkan kepada praktek pendidikan tradisional tanpa bantuan dari pemerintah, bahkan dikucilkan. Namun dengaan Poklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, pendidikan telah dianggap sebagai hak semua orang dan bukan lagi hak istimewa dari sekelompok kecil masyarakat Indonesia.

Di dalam rangka untuk mewujudkan suatu dunia yang lebih bahagia, dilahirkan apa yang disebut teori pemberantasan kemiskinan melalui pemutusan lingkaran setan yang menyebebkan kemiskinan absolut. Salah satu factor dari lingkaran setan itu ialah rendahnya pendidikan. Memang benar tingkat pendidikan yang rendah tidak dapat membawa manusia kepada kehidupan yang layak. Lahirlah gerakan dunia yang disebut *education for all*, yaitu pendidikan telah merupakan suatu kebutuhan pokok (*basic needs)* di dalam kehidupan manusia.

Didorong oleh prinsip ini maka maraklah antara lain progam-progam wajib belajar. Indonesia melaksanakan wajib belajar sekolah dasar 6 tahun yang telah dicapai pada tahun 1984 dengan penghargaan Aviciena dari UNESCO kepada Presiden Republik Indonesia. Kesuksesan wajib belajar 9 tahun atau wjib belajar sekolah lanjutan tingkatan pertama. Bahkan ada daerah yang sudah mulai melaksanakan wajib belajar 12 tahun. Gerakan yang menjadi popular diseluruh dunia ini bukannya tanpa kritik. Salah satu dari *trend* pendidikan abad 21 diprediksikan bahwa pendidikan formal atau wajib belajar sebenarnya tidak perlu terlalu lama, cukup sampai anak berusia 15 tahun, yang ditekankan ialah belajar dari kehidupan dan kemudian pendidikan dapat dilanjutkan kembali.

* + 1. *Sistematisasi Pendidikan*

Dengan dalih untuk meningkatkan mutu dan standar pendidikan nasional maka diadakanlah berbagai usaha dan peraturan untuk menyeragamkan pendidikan nasional. Berdasar dari asumsi-asumsi efisiensi dan keseragaman mak pendidikan naisonal diatur melalui undang-undang positif serta berbagai peraturan yang menjamin unformitas suatu sistem. Demikianlah kita mulai mengenal norma-norma nasional yang dicapai melalui ujian nasional seperti UMPTN dan EBTANAS. Berbagai cara dilaksanakan dengan menerapkan prinsip TQM (*Total Quality Management)* di dalam bidang pendidikan untuk mencapai mutu pendidikan yang dicita-citakan. Berbagai tes-tes standar dikembangkan untuk menyeragamkan mutu pendidikan di seluruh Negara.

Memang hasil sistematisasi pendidikan, dilihat dari segi tertentu, menunujukkan hasil-hasil yang menggembirakan seperti percepatan pencapaian target-target kuantitatif pendidikan. Namun demikian banyak pula hasil-hasil negatif yang dihasilkan di dalam usaha sistematisasi tersebut. Matinya inisiatif, kehilangan berpikir kritis serta berbagai pengaruh-pengaruh negatif lainnya telah lahir dari sistem pendidikan yang sangat kaku karena diatur oleh keinginan pencapaian keseragaman nasional. Ilmu pendidikan perbandingan telah digunakan untuk dijadikan acuan perkembangan sistem pendidikan di banyak Negara dan demi untuk menghilangkan ketertinggalan telah mengabaikan adanya unsur-unsur kebhinekaan yang ada dalam kehidupan masyarakat seperti di Indonesia.

* + 1. *Poliferasi Pendidikan*

Ketika kita memproklamirkan kemerdekaan, pendidikan boleh dikatakan sebagian besar diartikan sebagai pendidikan di sekolah. Di dalam perdebatan penyusunan undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah pada tahun 1950 tampak disitu bahwa pengertian pendidikan sekolah atu pendidikan formal juga mengandung arti pendidikan untuk masyarakat. Memang pada mulanya pendidikan masyarakat lebih diartikan kepada pemberantasan buta huruf akan tetapi seiring dengan kemajuan teknologi, masalah pendidikan perlu diperluas dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan tenaga kerja karena semakin maraknya pekembangan industri.

Dengan demikian terjadi poliferasi yang sangat cepat baik di dalam pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Multifikasi dari jenis dan sumber pendidikan telah memberikan banyak maslah yang dulu tidak dikenal di dalam manajemen pendidikan.

Sejalan dengan poliferasi pendidikan maka tanggung jawab pendidikan tampaknya lama kelamaan bergeser dari pendidikan keluarga ke lingkungan di luar keluarga bahkan di luar gedung sekolah. Perluasan ruang lingkup pendidikan yang dahulu menjadi tanggung jawab keluarga sekarang beralih pada kekuatan-kekuatan di luar lingkungan keluarga.

* + 1. *Politisasi Pendidikan*

Antara pendidikan dan politik terdapat kaitan yang sangat erat. Keduanya pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Keduanya mempunyai titik singgung yang sama ialah pertanyaan mengenai tujuan hidup manusia dan masyarakat. Keduanya menginginkan adanya kehidupan yang berbahagia. Baik pendidikan mupun kehidupan politik kedua-duanya diarahkan bagaimana mencipta pribadi dan masyarakat, yang membentuk kehidupan bersama, dapat mencipatakan kehidupan yang berbahagia.

Melalui proses pendidikan dapat dialihkan pemikiran-pemikiran, ide-ide, dan cara-cara untuk mewujudkan kehidupan bersama yang berbahagia. Dengan demikian mudah dimengerti mengapa terjadi proses politisasi terhadap pendiidkan nasioanal. Pendidikan dpat dijadikan alat untuk mempertahankan ideologi suatu Negara.

Kemudian yang menjadi masalah adalah pendidikan dijadikan sebagai alat penguasa dan bukan sebagai sarana untuk kehidupan bernegara. Pendidikan yang sebenarnya adalah pendidikan yang mengembangkan hati nurani dari peserta didik agar dia menjadi warga Negara bertanggung jawab. Apabila kita mengartikan proses pendidikan sebagai proses hominisasi dan humanisasi, maka pendidikan nasional tidak dapat lain yaitu untuk mnegmbangkan anggota masyarakat yang sadar akan hak-hak politiknya, sada akan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, sehingga dia dapat menjadi anggota masyarakat dan anggota negaranya yang bertanggung jawab, produktif, serta memiliki nilai-nilai etika.

Dari wacana tentang paradigma baru pendidikan di atas dapat diketahui bagaimana sosok masyarakat masa depan dengan nilai-nilainya yang dominan. Pendidikan merupakan sebagaian dari kehidupan masyarakat dan juga sebagai dinamisator masyarakat itu sendiri, meskipun sector pendidikan selalu terbelakang dalam berbagi sektor pembangunan lainnya, bukan saja karena sector itu lebih dilihat sebagai sector konsumtif, juga karena “by definition” pendidikan adalah penjaga status quo masyarakat itu sendiri. Betapa runyamnya kehidupan ini apabila tidak ada dasar pijakan dan tidak ada bintang penunjuk jalan. Kehidupan tanpa jiwa.

Selanjutnya tentang perkembangan generasi nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia dapat dilihat adanya kesinambungan nilai-nilai antar generasi. Nilai-nilai dasar akan semakin kokoh dalam perjalanan kehidupan bangsa seperti nasionalisme dan patriotisme. Sebagai nilai-nilai generasi pertama dari perjalanan hidup bangsa Indonesia. Sudah tentu nilai-nilai luhur itu perlu ditempa, dihaluskan, dan diasah terus menerus sesuai dengan perubahan kehidupan. Inilah salah satu tugas dari Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), menjaga melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa.

Aspek kedua yang dihadapi Sistem Pendidikan Nasional ialah dinamika dari kehidupan nasional itu sendiri. Masyarakat akan terus berubah dan setiap perubahan membawa nilai-nilai baru. Ada yang sejalan dengan nilai-nilai yang berlaku, tetapi banyak yang justru berlawanan. Apalagi kehidupan manusi dewasa ini telah mengglobal sehingga tidak bisa mengelak dari perubahaperubahan di dunia, misalnya tentang bagaimana pengaruh kemajuan IPTEK dalam kehidupan manusia. Dunia pendidikan biasanya tidak siap dalam menghadapi kemungkinan perubahan-perubahan itu. Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional seyogyanya sensitive terhadap gerak perubahan itu agar dapat menyiapkan generasi muda tanggap dan dapat ikut mengarahkan dinmika perubahan masyarakat tersebut.

Fungsi dan peranan Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) menjelang Abad-21, yang memberikan prioritas pada peningkatan mutu pendidikan nasional. Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan oleh Sistem Pendidikan Nsioanal (SISDIKNAS) dalam rangka penigkatan mutu pendidikan yakni meliputi:

* 1. Aspek Akademik
  2. Aspek Religio Mental
  3. Aspek Ketenegakerjaan.[[42]](#footnote-43)
     + 1. **Madrasah Masa Depan**

Upaya membangkitkan masyarakat belajar yang profesional di Madrasah memerlukan kemampuan, kesiapan, niat atau tekad yang kuat, serta sikap kebersamaan dari semua warga Madrasah, yang dipelopori oleh kepala madrasah dan didukung oleh Pengurus Yayasan, BP3 atau Majelis Madrasah, serta didikuti oleh para guru dan staf lainnya untuk berpartisipasi dalam melakukan pengembangan dan di Madrasah guna menetap masa depan yang lebih baik, serta ddukung boleh aturan-aturan dan kebijakan yang fleksibel baik dari Kanwil ataupun pusat.[[43]](#footnote-44)

Madrasah yang diharapkan adalah madrasah yang dapat memenuhi standar pendidikan nasional, antara lain:

1. Memenuhi standar isi

Madrasah ideal yang diharapkan di masa depan adalah madrasah yang memenuhi standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi meliputi kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar dan kalender pendidikan.

Setiap kelompok mata pelajaran pada madrasah hendaknya dilaksanakan secara holistik, terpadu dan terintergrasi sehingga pembelajaran masing-masing kelompok mata pelajaran mempengaruhi pemahaman atau penghayatan peserta didik, sehingga semua kelompok tersebut juga sama pentingnya dalam menentukan kelulusan peserta didik.

1. Menyelenggarakan proses belajar dengan tepat

Madrasah yang ideal hendaknya mampu memenuhi hal terkait dengan proses pembelajaran sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan proses pembelajaran secara interaktif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik.
2. Dalam proses pembelajaran madrasah tidak hanya berfungsi mengalihkan pengetahuan (*transfer of knowledge*), tetapi juga memberikan keteladanan
3. Menyusun perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien
4. Memilih dan menentukan tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar dengan tepat
5. Memiliki rasio yang tepat antara peserta didik dengan pendidik, antara buku dan teks dengan peserta didik, dan jumlah peserrta didik dalam setiap kelasnya
6. Madrasah melakukan pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan sesuai standar dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan
7. Memenuhi standar kompetensi lulusan

Madrasah masa depan yang diharapkan agar menjadikan standar kompetensi lulusan sebgai kriteria dasar penilaian. Dalam penentuan kelulusan peserta didik pada setiap mata pelajaran, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. Menjadikan kompetensi lulusan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

1. Memenuhi standar pendidik dan tenaga kependidikan

Pendidik dan tenaga kependidikan pada madrasah di masa depan agar memiliki kualifiksi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, professional, dan sosial.

1. Memiliki sarana dan prasarana yang standar

Madrasah masa depan diharapkan memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan sesuai standar nasional pendidikan.

1. Menerapkan standar pengelolaan dengan MBM

Madrasah ideal yang diharapkan agar menerapkan manajemen berbasis madrasah (MBM) yag dittunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas baik dari kepala sekolah, dewan pendidik maupun dari komite madrasah.

1. Memenuhi standar pembiayaan

Madrasah di masa depan diharapkan dapat mengelola pembiyayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal dengan baik dan benar.

1. Memenuhi standar penilaian pendidikan

Madrasah masa depan diharapkan mengadakan penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah oleh pendidik, madrasah dan pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil. Penilaian hasil belajar oleh madrasah bertujuan mengukur pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran yang mencakup kelompok mata pelajaran agama dsb. Penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari madrasah mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik.[[44]](#footnote-45)

Jika inti dari kehidupan masyarakat adalah perubahan, maka dengan mendekatkan pendidikan terhadap masyarakat, diharapkan manusia yang dihasilkan dari pendidikan mampu berada pada posisi sentral dalam perubahan yang terjadi dan mampu pula mengarahkan serta mengendalikan perubahan itu.[[45]](#footnote-46) Pendidikan seperti inilah barangkali yang memiliki perspektif pemberdayaan.

Gambaran tentang madrasah yang diharapkan masyarakat masa depan di atas diharapkan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas sejalan dengan kemajuan pembangunan diberbagai sektor kehidupan. Lembaga pendidikan dituntut dapat menawarkan progam-progamnya secara cerdas berdasarkan kebutuhan kekinian dan kedisiplinan serta menjanjikan masa depan. Sehingga keberdaannya dapat fungsional baik bagi keperluan menciptakan dan mengembangkan ilmu-ilmu baru, lapangan kerja, baru, membina sikap hidup kritis dan pola tingkah laku yang baru serta kecenderungan-kecenderungan baru.

1. **Inovasi Sistem Pendidikan**
2. **Pengertian Inovasi Sistem Pendidikan**

Secara etimologi *inovasi* berasal dari kata latin *“innovation”* yang berarti pembaruan dan perubahan.[[46]](#footnote-47) Inovasi adalah suatu perubahan yang baru menuju ke arah perbaikan, yang lain atau berbeda dari yang ada sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan berencana (tidak secara kebetulan saja). Inovasi menurut Hasbullah, diartikan “pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru; penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau alat)”.[[47]](#footnote-48)

Istilah perubahan dan pembaruan ada perbedaan dan persamaannya. Perbedaannya, kalau pada pembaruan ada unsur kesengajaan. Persamaannya yakni sama-sama memiliki unsur yang baru atau lain dari yang sebelumnya. Cara penggunaan potensi yang lama dalam rangka meningkatkan efisiensi suatu usaha, juga dinamakan inovasi.

Pembaharuan adalah “upaya memperkenalkan berbagai hal yang baru dengan maksud memperbaiki apa-apa yang sudah terbiasa demi timbulnya praktek kegiatan yang baru, baik dalam metode ataupun cara-cara bekerja untuk mencapai tujuan”.[[48]](#footnote-49) Inovasi atau pembaharuan adalah “upaya memperkenalkan berbagai hal yang baru dengan maksud memperbaiki apa-apa yang sudah terbiasa demi timbulnya praktek yang baru, baik dalam metode ataupun cara-cara bekerja untuk mencapai tujuan”.[[49]](#footnote-50)

Dalam Al-Qur’an, ayat yang berhubungan dengan inovasi yaitu Surat Ar-Ra’du/13 ayat 11 yang berbunyi:

Artinya: *“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.*[[50]](#footnote-51)

Ayat ini dipertegas dengan hadits Rasulullah SAW dari Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang menjelaskan bahwa manusia harus terus berusaha dalam hidupnya walaupun Allah telah menentukan takdir manusia sebelum dilahirkan, hadits tersebut berbunyi:

ماَ مِنْ كُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّأرِ أَوْ مِنَ الجَنَّةِ، فَقَالَ رَجُلٌ مَنَ القَوْمِ، أَلاَِ نَتَّكِلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ: لاَ اعْمَلُوْا كُلٌّ مُيَسََّرٌ، ثُمَّ قَرَأَ ( رواه بخاري و مسلم )

Artinya*: “Setiap dari kalian telah ditulis (ditetapkkan) tempatnya di Surga atau di neraka. Ada seorang sahabat bertanya, “Mengapa kita tidak (tawaakul-pasrah) saja, wahai Rasul Allah?” Beliau menjawab: “Tidak. Berbuatlah karena masing-masing akan dimudahkan”*.[[51]](#footnote-52)

Menurut Hornby yang dikutip oleh Wasty Soemanto, inovasi adalah “mengadakan perubahan-perubahan (*make changes*) dan memperkenalkan sesuatu yang baru (*introduce new changes*)”.[[52]](#footnote-53) Menurut C. Rhoviq DIP. T, inovasi adalah “mengadakan berbagai perubahan yang dianggap perlu terhadap sesuatu yang sudah ada dan diisi dengan memperkenalkan sesuatu yang baru”.[[53]](#footnote-54) Demikian pula Nurtain Ansyar sebagaimana dikutip oleh Zahara Idris, mengemukakan inovasi adalah “gagasan, perbuatan, atau sesuatu yang baru dalam konteks sosial tertentu untuk menjawab masalah yang dihadapi”.[[54]](#footnote-55)

Jadi inovasi adalah suatu bentuk perubahan yang sengaja diciptakan atau direncanakan sebagai upaya perbaikan terhadap sesuatu yang ada menjadi lebih baik, lebih berkualitas, lebih maju dari sebelumnya.

Sedangkan mengenai sistem pendidikan; sistem bukanlah “cara” atau “metode” seperti yang banyak dikatakan orang. Cara hanyalah bagian kecil dari sistem. Istilah sistem meliputi spectrum yang sangat luas. Sedangkan pendidikan dapat diartikan sebagai ”usaha yang dilakukan dengan sengaja sistematis untuk mendorong, membantu dan membimbing seseorang untuk mengembangkan segala potensinya serta mengubah diri sendiri dari kualitas satu ke kualitas yang lain yang lebih canggih”.[[55]](#footnote-56)

Ada tiga ciri utama suatu sistem. *Pertama*, suatu sistem mempunyai tujuan tertentu; *kedua*, untuk mencapai tujuan, suatu sistem memiliki fungsi-fungsi tertentu; *ketiga*, untuk menggerakkan fungsi, suatu sistem harus ditunjang oleh berbagai komponen.[[56]](#footnote-57) Sistem merupakan jumlah keseluruhan dari bagian-bagiannya yang saling bekerja bersama untuk mencapai hasil yang diharapkan berdasarkan atas kebutuhan yang telah ditentukan. Setiap sistem pasti mempunyai tujuan, dan semua kegiatan dari semua komponen-komponen atau bagian-bagiannya adalah diarahkan untuk menuju tercapainya tujuan tersebut. Oleh karena itu, proses pendidikan merupakan sebuah sistem yang disebut sebagai sistem pendidikan.

Secara teoritis, suatu sistem pendidikan terdiri dari komponen-komponen atau bagian-bagian yang menjadi inti dari proses pendidikan. Adapun komponen atau faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Tujuan; Tujuan disebut juga cita-cita pendidikan yang berfungsi untuk memberikan arah terhadap semua kegiatan dalam proses pendidikan.
2. Peserta didik; Fungsinya adalah sebagai obyek yang sekaligus sebagi subyek pendidikan. Sebagai obyek, peserta didik tersebut menerima perlakuan-perlakuan tertentu, tetapi dalam pandangan pendidikan modern, peserta didik lebih sebagai subjek atau pelaksanaan pendidikan.
3. Pendidik; Pendidik berfungsi sebagai pembimbing pengaruh, untuk menumbuhkan aktifitas peserta didik dan sekaligus sebagai pemegang tanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan.
4. Alat pendidikan; Maksudnya adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berfungsi untuk mempermudah atau mempercepat tercapainya tujuan pendidikan.
5. Lingkungan; Maksudnya lingkungan sekitar yang dengan sengaja digunakan sebagai alat dalam proses pendidikan. Lingkungan berfungsi sebagai wadah atau lapangan terlaksananya proses pendidikan.[[57]](#footnote-58)

Jadi sistem pendidikan adalah kesatuan komponen-komponen pendidikan yang menjadi satu kesatuan utuh yang saling berkaitan, yang mempunyai arah dan tujuan demi terwujudnya tujuan pendidikan. Dari penjelasan-penjelasan mengenai inovasi dan sistem pendidikan, maka dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan inovasi sistem pendidikan atau pembaharuan di bidang pendidikan adalah usaha mengadakan perubahan dalam sistem pendidikan dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik, yakni pendidikan yang lebih berkualitas.

1. **Tujuan Inovasi Sistem pendidikan**

Pembaharuan pendidikan sebagai perspektif baru dalam dunia kependidikan mulai dirintis sebagai alternatif untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang belum dapat di atasi dengan cara yang konvensional secara tuntas. Jadi pembaharuan dilakukan untuk memecahkan masalah pendidikan dan menyongsong arah perkembangan dunia kependidikan yang memberikan harapan kemajuan lebih pesat. Secara garis besarnya tujuan dari inovasi pendidikan itu sendiri adalah:[[58]](#footnote-59)

1. Pembaharuan pendidikan sebagai tanggapan baru terhadap masalah-masalah pendidikan

Titik pangkal pembaharuan pendidikan adalah masalah pendidikan yang aktual yang secara sistematis akan dipecahkan dengan cara yang inovatif. Cara inovatif yang dimaksudkan adalah segala cara pemecahan yang terpilih dan secara nyata mampu memecahkan maslaah yang timbul (yang nyata-nyata dihadapi). Beberapa tahapan yang penting dalam penerapan pembaharuan pendidikan meliputi:

1. Penentuan masalah
2. Penentuan tujuan/ sasaran
3. Mempertimbangkan segala sumber dan hambatan yang berkaitan
4. Pengumpulan alternatif pemecahan
5. Penentuan alternatif terpilih
6. Pencobaan
7. Modifikasi dan revisi aternetif pemecahan,
8. Pelaksanaan dan pengembangannya[[59]](#footnote-60)

Pendekatan sistem dalam usaha pembaharuan pendidikan dipandang sebagai tanggapan terhadap masalah pendidikan yang baru dan komperhensif. Pembaharuan pendidikan dengan pendekatan sistem untuk pemecahan masalah pendidikan yang mengutamakan subjek pendidikan lebih bersifat tanggap (*responsive*) terhadap masalah-masalah yang baru.

1. Pembaharuan pendidikan sebagai upaya untuk memperkembangkan pendekatan yang lebih efektif dan ekonomis

Sifat pendekatan yang diperlukan untuk memecahkan masalah pendidikan yang kompleks dan berkembang itu harus berorientasi pada masalah efektif dan murah, serta peka terhadap timbulnya masalah pendidikan yang baru.[[60]](#footnote-61)

1. **Hambatan dan Sebab-Sebab Inovasi Sistem Pendidikan**

Menurut Kjell Skogen, ada empat macam kategori hambatan dalam konteks inovasi. Keempat kategori tersebut adalah:[[61]](#footnote-62)

1. *Hambatan Psikologis*

Hambatan-hambatan ini ditemukan bila kondisi psikologis individu menjadi faktor penolakan. Hambatan psikologis telah dan masih merupakan kerangka kunci untuk memahami apa yang terjadi bila orang dan sistem melakukan penolakan terhadap upaya perubahan. Beberapa dimensi tantang aspek hambatan psikologi pribadi seseorang antara lain:

* 1. Dimensi kepercayaan/keamanan versus ketidakpercayaan/ketidak-amanan
  2. Rasa bersalah,
  3. Kebutuhan akan pengakuan,
  4. Keinginan untuk menguasai,
  5. Pola peranan yang kaku dalam sistem sosial,
  6. Pola perilaku yang kurang pertimbangan atau tidak pantas yang dipertahankan berdasarkan prinsip-prinsip imbalan tertentu, atau ketidaktahuan tentang masalah.

1. *Hambatan Praktis*

Hambatan praktis adalah faktor-faktor penolakan yang lebih bersifat fisik. Untuk memberikan contoh tentang hambatan praktis, faktor-faktor berikut ini akan dibahas:

* + 1. Waktu

Dalam hal mengimplementasikan perubahan, faktor waktu sering kurang diperhitungkan. Segala sesuatu memerlukan waktu. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengalokasikan banyak waktu bila kita membuat perencanaan inovasi. Pengalaman menunjukkan bahwa masalah yang tidak diharapkan, yang mungkin tidak dapat diperkirakan pada tahap perencanaan, kemungkinan akan terjadi.

* + 1. Sumber daya

Dalam perencanaan dan implementasi inovasi, tingkat pengetahuan dan jumlah dana yang tersedia harus dipertimbangkan. Ini berlaku terutama jika sesuatu yang sangat berbeda dari praktek di masa lalu akan dilaksanakan, dengan kata lain jika ada perbedaan yang besar antara yang lama dengan yang baru. Dalam kasus seperti ini, tambahan sumber daya dalam bentuk keahlian dan keuangan dibutuhkan.

* + 1. Sistem

Organisasi atau sistem itu sendiri dapat menjadi hambatan bagi inovasi. Dalam kasus tertentu, struktur organisasi dapat menjadi hambatan bila menghadapi dan memecahkan masalah baru.

1. *Hambatan Nilai-Nilai*

Hambatan nilai melibatkan kenyataan bahwa suatu inovasi mungkin selaras dengan nilai-nilai, norma-norma dan tradisi-tradisi yang dianut orang-orang tertentu, tetapi mungkin bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut sejumlah orang lain. Jika inovasi berlawanan dengan nilai-nilai sebagian peserta, maka bentrokan nilai akan terjadi dan penolakan terhadap inovasi pun muncul.

1. *Hambatan Kekuasaan*

Seseorang yang berada pada posisi kekuasaan atau mereka yang berjuang untuk mendapatkan kekuasaan dapat menjadi hambatan dalam suatu inovasi. Jika alokasi kekuasaan pribadi, profesional atau ekonomi terancam atau berkurang oleh perubahan praktek-praktek yang telah ada.[[62]](#footnote-63)

Hambatan-hambatan lain inovasi pendidikan yang datang, baik dari luar maupun dari dalam sistem pendidikan itu sendiri, di antaranya adalah:

1. Sumber-sumber yang makin terbatas dan belum dimanfaatkannya sumber yang ada secara efektif dan efisien.
2. Sistem pendidikan yang masih lemah dengan tujuan yang masih kabur, kurikulumnya belum serasi, relevan, suasana belum menarik, dan sebagainya
3. Pengelolaan pendidikan yang belum mekar dan mantap dan belum peka terhadap perubahan dan tuntutan keadaan, baik masa kini maupun masa akan datang
4. Masih kabur dan belum mantapnya konsepsi tentang pendidikan dan interpretasinya dalam praktek.[[63]](#footnote-64)
5. Etimasi yang tidak tepat terhadap inovasi
6. Konflik dan motivasi yang kurang sehat
7. Lemahnya berbagai faktor penunjang sehingga mengakibatkan tidak berkembangnya inovasi yang dihasilkan
8. Masalah-masalah keuangan (financial) yang tidak memenuhi
9. Adanya penolakan dari kelompok tertentu atas hasil inovasi
10. Kurang adanya hubungan sosial dan publikasi.[[64]](#footnote-65)

Sedangkan sebab-sebab diadakannya inovasi pendidikan di antaranya adalah:

1. Bertambahnya jumlah penduduk yang sangat cepat dan sekaligus bertambahnya keinginan masyarakat untuk mendapat pendidikan, yang secara kumulatif menuntut tersedianya sarana pendidikan yang memadai.
2. Berkembangnya ilmu pengetahuan yang modern menghendaki dasar-dasar pendidikan yang kokoh dan penguasaan pengetahuan yang terus menerus dan demikian menuntut pendidikan yang lebih lama sesuai dengan konsep pendidikan seumur hidup (*long life education*).
3. Berkembangnya teknologi yang mempermudah manusia dalam menguasai dan memanfaatkan alam lingkungannya, tetapi yang sering kali ditangani sebagai suatu ancaman terhadap kelestarian peranan manusiawi.[[65]](#footnote-66)

Menurut H. A. R Tilaar, yang menjadi hambatan-hambatan inovasi pendidikan dan sebabnya adalah:

* 1. Birokrasi Pemerintah

Satu hal ini, yang menjadi hambatan paling mendasar, karena inovasi pendidikan adalah skala nasional yang merupakan suatu keputusan politik tingkat tinggi pada sistem pendidikan yang disesuaikan dengan perubahan masyarakat. Hal itu disebabkan karena adanya perubahan sruktur dalam pemerintahan, sehingga inovasi yang telah digagas sebelumnya tidak terlaksana dengan sepenuhnya, karena disebabkan oleh munculnya gagasan-gagasan baru dari pemerintah yang merasa kurang puas dengan hasil gagasan sebelumnya. Hal ini juga merupakan kepentingan orang-orang yang did alam pemerintahan, untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri dengan jalan mengorbankan gagasan yang belum sepenuhnya diterapkan dalam pendidikan. seperti, kurikulum pendidikan, yang terus mengalami perubahan.

* 1. Biaya Pendidikan

Hal yang satu ini juga menjadi permasalahan yang sangat vital dalam dunia pendidikan, khususnya dalam inovasi pendidikan yang pada dasarnya mencari gagasan yang kompeten untuk peningkatan mutu dalam pendidikan, karena untuk membuat inovasi yang sesuai dengan harapan, perlu dana yang memadai. Hal ini disebabkan oleh perekonomian indonesia yang masih jauh di bawah batas normal standar perekonomian dunia. Sehingga dari pemerintah kita sendiri masih kesulitan untuk memberikan biaya pendidikan yang sesuai dengan kebijakannya dalam PP. Contohnya seperti; biaya pendidikan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan sebesar 20% dari anggaran pendapatan negara.

* 1. Guru

Dalam pendidikan, peran seorang guru sangat diperlukan, apalagi profesionalitas guru itu harus dipertimbangkan dahulu sebelum beliau memberikan pemikirannya dalam pendidikan, khususnya dalam pengajaran. Hal ini disebabkan oleh SDM guru yang masih rendah dan masih perlu pembinaan yang khusus, sehingga inovasi dalam dunia pendidikan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan harapan.[[66]](#footnote-67)

* 1. Siswa

Dalam hal ini, yang jadi sorotan adalah kesiapan siswa dalam menerima inovasi-inovasi baru dalam dunia pendidikan, karena apabila siswa belum merasa siap menerima inovasi baru, maka akan dirasa sia-sia. Hal ini disebabkan karena siswa harus menyesuaikan diri lagi dengan gagasan baru (dalam inovasi), dan hal yang dikhawatirkan dapat muncul, ketika memang inovasi itu tidak dapat diaplikasikan dengan maksimal. Seperti, out-put yang jelek disebabkan oleh tidak siapnya siswa menerima gagasan baru tersebut.

* 1. Masyarakat

Masyarakat juga memerlukan kesiapan untuk menerima inovasi-inovasi baru, karena peran masyarakat juga tidak dapat dinafikan dalam dunia pendidikan. Masyarakat sebagai pendukung pelaksanaan pendidikan di lingkungannya masing-masing. Hal ini disebabkan karena pengetahuan masyarakat tentang pendidikan yang sangat parsial, sehingga kesiapannya pun perlu ditata untuk menerima inovasi-inovasi baru itu.[[67]](#footnote-68)

* 1. Administrasi Pendidikan

Administrasi pendidikan ini menyangkut beberapa hal, sarana-prasarana pendidikan, sistem pendidikan dalam sekolah-sekolah, bisa juga biaya pendidikan. hal ini disebabkan karena penyedian beberapa hal tersebut yang sampai sekarang masih sangat minim. sehingga untuk mengeluarkan inovasi-inovasi terbaru masih sangat sulit, karena terhambat oleh hal tersebut.

Maka dapat disimpulkan, bahwa inovasi pendidikan secara makro pada tingkat nasional adalah syarat kompleks karena berkaitan dengan masalah biaya, fasilitas, validitas dari pada inovasi itu sendiri, skala percobaan, konformitas dengan kebijakan nasional, nilai-nilai birokrasi dan budaya serta tentunya kepentingan politik dan ekonomi. Dengan demikian dapat diambil pelajaran bahwa, inovasi secara makro masih menghadapi banyak kendala dan akan berakhir dengan kegagalan, rupa-rupanya perlu dipersiapkan dengan matang.[[68]](#footnote-69)

1. **Komponen yang Harus Diperhatikan dalam Inovasi Pendidikan**

Untuk menghindari penolakan seperti yang disebutkan di atas, faktor-faktor utama yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan adalah guru, siswa, kurikulum dan fasilitas, dan program/tujuan.[[69]](#footnote-70)

1. Guru

Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Kepiawaian dan kewibawaan guru sangat menentukan kelangsungan proses belajar mengajar di kelas maupun efeknya di luar kelas. Guru harus pandai membawa siswanya kepada tujuan yang hendak dicapai.

Ada beberapa hal yang dapat membentuk kewibawaan guru antara lain adalah:

1. Penguasaan materi yang diajarkan
2. Metode mengajar yang sesuai dengan situasi dan kondisi siswa
3. Hubungan antar individu, baik dengan siswa maupun antar sesama guru dan unsur lain yang terlibat dalam proses pendidikan seperti adminstrator, misalnya kepala sekolah dan tata usaha serta masyarakat sekitarnya
4. Pengalaman dan ketrampilan guru itu sendiri.

Dengan demikian, maka dalam pembaharuan pendidikan, keterlibatan guru mulai dari perencanaan inovasi pendidikan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasinya memainkan peran yang sangat besar bagi keberhasilan suatu inovasi pendidikan. Tanpa melibatkan mereka, maka sangat mungkin mereka akan menolak inovasi yang diperkenalkan kepada mereka.

1. Siswa

Sebagai obyek utama dalam pendidikan terutama dalam proses belajar mengajar, siswa memegang peran yang sangat dominan. Dalam proses belajar mengajar, siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan intelegensia, daya motorik, pengalaman, kemauan dan komitmen yang timbul dalam diri mereka tanpa ada paksaan. Hal ini bisa terjadi apabila siswa juga dilibatkan dalam proses inovasi pendidikan, walaupun hanya dengan mengenalkan kepada mereka tujuan dari pada perubahan itu mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan, sehingga apa yang mereka lakukan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan dengan konsekwen.

Peran siswa dalam inovasi pendidikan tidak kalah pentingnya dengan peran unsur-unsur lainnya, karena siswa bisa sebagai penerima pelajaran, pemberi materi pelajaran pada sesama temannya, petunjuk, dan bahkan sebagai guru. Oleh karena itu, dalam memperkenalkan inovasi pendidikan sampai dengan penerapannya, siswa perlu diajak atau dilibatkan sehingga mereka tidak saja menerima dan melaksanakan inovasi tersebut, tetapi juga mengurangi resistensi seperti yang diuraikan sebelumnya.

1. Kurikulum

Kurikulum pendidikan, lebih terbatas lagi kurikulum sekolah meliputi program pengajaran dan perangkatnya merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Oleh karena itu kurikulum sekolah dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar mengajar di sekolah, sehingga dalam pelaksanaan inovasi pendidikan, kurikulum memegang peranan yang sama dengan unsur-unsur lain dalam pendidikan. Tanpa adanya kurikulum dan tanpa mengikuti program-program yang ada di dalamya, maka inovasi pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan inovasi itu sendiri.

Oleh karena itu, dalam pembahruan pendidikan, perubahan itu hendaknya sesuai dengan perubahan kurikulum atau perubahan kurikulum diikuti dengan pembaharuan pendidikan dan tidak mustahil perubahan dari kedua-duanya akan berjalan searah.

1. Fasilitas

Fasilitas, termasuk sarana dan prasarana pendidikan, tidak bisa diabaikan dalam dalam proses pendidikan khususnya dalam proses belajar mengajar. Dalam pembahruan pendidikan, tentu saja fasilitas merupakan hal yang ikut mempengaruhi kelangsungan inovasi yang akan diterapkan. Tanpa adanya fasilitas, maka pelaksanaan inovasi pendidikan akan bisa dipastikan tidak akan berjalan dengan baik. Fasilitas, terutama fasilitas belajar mengajar merupakan hal yang esensial dalam mengadakan perubahan dan pembahruan pendidikan.

Oleh karena itu, jika dalam menerapkan suatu inovasi pendidikan, fasilitas perlu diperhatikan. Misalnya ketersediaan gedung sekolah, bangku, meja dan sebagainya.

1. Lingkup Sosial Masyarakat.

Dalam menerapakan inovasi pendidikan, ada hal yang tidak secara langsung terlibat dalam perubahan tersebut tapi bisa membawa dampak, baik positif maupun negatif, dalam pelaklsanaan pembahruan pendidikan. Masyarakat secara tidak langsung atau tidak langsung, sengaja maupun tidak, terlibat dalam pendidikan. Sebab, apa yang ingin dilakukan dalam pendidikan sebenarnya mengubah masyarakat menjadi lebih baik terutama masyarakat di mana peserta didik itu berasal.

Tanpa melibatkan masyarakat sekitarnya, inovasi pendidikan tentu akan terganggu, bahkan bisa merusak apabila mereka tidak diberitahu atau dilibatkan. Keterlibatan masyarakat dalam inovasi pendidikan sebaliknya akan membantu inovator dan pelaksana inovasi dalam melaksanakan inovasi pendidikan.[[70]](#footnote-71)

Menurut Cece Wijaya, dkk. ada lima faktor penting yang harus diperhatikan dalam pembaharuan pendidikan dan pengajaran atau yang biasa dikenal dengan istilah *inovasi pendidikan,* faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Guru

Guru adalah orang yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru harus betul-betul membawa siwanya kepada tujuan yang ingin dicapai. Guru harus mampu mempengaruhi siswanya kepada tujuan yang ingin dicapai. Guru harus berpandangan luas dan kriteria bagi seorang guru adalah harus memiliki wibawa. Guru yang mempunyai wibawa berarti mempunyai kesungguhan, suatu kekuatan, sesuatu yang dapat memberikan kesan dan pengaruh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk mengadakan inovasi pendidikan, profesionalisme guru harus ditingkatkan.

1. Siswa

Siswa merupakan objek utama dalam proses belajar mengajar. Siswa dididik oleh pengalaman belajar mereka, dan kualitas pendidikannya bergantung pada pengalamannya, kualitas pengalaman-pengamalan, sikap-sikap, termasuk sikap-sikapnya pada pendidikan. Dalam kenyataannya, pengalaman muruid di luar progam akademis sering sama pentingnya atau malah lebih penting di dalam rangka pengaruh pendidikan dan intelektual yang dipelajarinya pada kurikulum regular. Oleh karena itu dalam mengadakan inovasi pendidikan, kita harus memperhatikannya, dari segi muid karena murid itu merupakan objek yang diarahkan.

1. Fasilitas

Proses belajar mengajar akan berjalan lancar kalau ditunjang oleh sarana yang lengkap. Oleh karena masalah fasilitas merupakan masalah yang esensial dalam pendidikan, maka dalam pembaharuan kita harus serempak pula memperbaharui, mulai dari gedung sekolah sampai kepada masalah yang paling dominan, yaitu alat peraga sebagai penjelasan dalam menyampaikan pendidikan.

1. Progam/ Tujuan/ Rencana

Dalam proses belajar mengajar kita harus mempunyai tujuan yang jelas. begitu pula dalam pembaharuan pendidikan tidak akan berhasil kalau mengesampingkan masalah tujuan. Sebaliknya dengan memperjelas tujuan akan lebih mudahlah kepada apa yang akan kita lakukan.

1. Kurikulum

Kuirkulum dalam arti yang luas adalah yang meliputi seluruh progam dan kehidupan dalam sekolah. Kurikulum sekolah dapat dipandang sebagai bagian dari kehidupan. Oleh karena itu, kurikulum berpengaruh sekali kepada maju mundurnya pendidikan. Kurikulum itu tidak statis tetapi dinamis dan senantiasa dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dalam faktor-faktor yang mendasarinya.

Apabila kita mengadakan pembaharuan dalam pendidikan, kita harus memperhatikan kurikulum yang sudah dirumuskan. Kalau pendidikan diperbaharui, maka sudah barang tentu kurikulumya pun harus berubah. Kita tidak bisa mengadakan inovasi tanpa perubahan pada kurikulum.[[71]](#footnote-72)

1. **Inovasi Sistem Pendidikan Madrasah di Indonesia.**

Perpaduan antara sistem pada pondok pesantren atau pendidikan langgar dan sistem yang berlaku pada sekolah-sekolah modern merupakan sistem pengajaran yang dipergunakan di madrasah. Proses perpaduan tersebut berlangsung secara berangsur-angsur dan mengikuti sistem klasikal.[[72]](#footnote-73)

Sistem dan isi madrasah diupayakan adanya penggabungan antara sistem pesantren dengan sekolah umum. Penyusun ensiklopedi Indonesia, pada pasal yang membicarakan madrasah sebagai perpaduan antara pendidikan sistem pondok yang khusus mengajarkan agama Islam dengan sistem pendidikan yang mengajarkan ilmu pengetahuan umum.Sejak lahirnya sistem madrasah di Indonesia, telah memiliki ciri khas yang membedakannya dari pesantren dan sekolah umum, yaitu upaya untuk mengorvegensikan antara mata pelajaran umum dengan mata pelajaran agama. Dalam usaha memadukan itu tidak dapat kesamaan antara satu madrasah dengan madrasah lainnya, seperti yang di ungkapkan terdahulu.

Dalam perkembangannya sistem madrasah ini dibedakan menjadi dua macam yaitu madrasah yang khusus memberikan pendidikan dan pengajaran agama disebut Madrasah Diniyah, dan madrasah yang disamping memberikan pendidikan dan pengajaran agama juga memberi pelajaran umum.[[73]](#footnote-74) Bahkan kemudian lahirlah madrasah-madrasah yang mengikuti sistem perjenjangan dan bentuk-bentuk sekolah modern, seperti Madrasah Ibtidaiyah sama dengan Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah sama dengan Sekolah Menengah Pertama, dan Madrasah sama dengan sekolah Menengah Atas.

Walaupun terdapat keanekaragaman dalam upaya menggabungkan antara mata pelajaan agama dengan mata pelajaran umum, namun madrasah tetap sebagai lembaga pendidikan Islam yang menjadikan mata pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok atau dasar. Pengertian mata pelajaran pokok atau dasar, adalah mata pelajaran yang menentukan dalam memberi penilaian terhadap status siswa baik pada waktu penentuan naik kelas atau penentuan ujian akhir.[[74]](#footnote-75)

Kurikulum madrasah dan sekolah-sekolah agama masih mempertahankan agama sebagai mata pelajaran pokok, walaupun dengan persentase yang berbeda. Pada waktu pemerintah Republik Indonesia, Kementrian Agama yang mengadakan pembinaan dan pengembangan terhadap sistem pendidikan madrasah melalui kementrian agama, merasa perlu menentukan kriteria madrasah. Kriteria yang ditetapkan oleh menteri agama untuk madrasah-madrasah yang berada dalam wewenangnya adalah harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok, paling sedikit 6 jam seminggu.

Pengetahuan umum yang diajarkan madrasah adalah:

1. Membaca dan menulis huruf latin, bahasa Indonesia
2. Berhitung
3. Ilmu bumi
4. Sejarah Indonesia dan dunia
5. Olahraga dan kesehatan.[[75]](#footnote-76)

Selain mata pelajaran agama dan bahasa Arab serta yang disebutkan di atas, juga diajarkan berbagai ketrampilan sebagai bekal para lulusannya terjun ke masyarakat.

Dengan sistem kurikulum sekolah dimaksudkan adalah sejumlah komponen atau unsur yang terdapat dalam kurikulum yang saling berhubungan dan berpengaruh satu sama lain. Rangkaian komponen itu adalah seperangkat ketentuan dan pedoman yang dinyatakan berlaku melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Agama Republik Indonesia.

Komponen-komponen kurikulum sekolah dan madrasah di atas dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Tujuan Institusional (Tujuan Kelembagaan)
2. Struktur Progam Kurikulum
3. Garis-garis Besar Progam Pengajaran (GBPP)
4. Sistem pengajaran
5. Sistem Penilaian
6. Sistem Bimbingan dan Penyuluhan ataua sistem Bimbingan Karir
7. Sistem Administrasi dan Supervisi.[[76]](#footnote-77)

Ketujuh komponnen di atas saling berhubungan secara hirarkis dan konsekutif. Hirarkis artinya komponen-komponen tersebut saling berhubungan dan tersusun secara berurutan satu sama lainnya, dari tingkat pertama sampai tingkat ketujuh. Konsekutif artinya bahwa antar komponen-komponen tersebut saling memberikan pengaruh dan berakibat pada komponen kedua, ketiga, dan seterusnya. Namun demikian, kurikulum sebagai suatu sistem ketujuh komponen di atas memiliki satu tujuan, yakni tercapainya tujuh pendidikan nasional.

Ditinjau dari segi histories dapat dilihat bahwa madrasah telah mengalami perubahan-perubahan. Pada awal tahap madrasah semata-mata mengajarkan mata pelajaran agama, kemudian sesuai dengan tuntutan zaman madrasah memasukkan mata pelajaran umum. Pada tahap ini mata pelajaran umum bagi kebanyakan madrasah hanya sebagai pelengkap saja.

Perkembangan berikutnya dengan dikeluarkan SKB Tiga Menteri Tahun 1975, pada fase ini mata pelajaran umum pada madrasah lebih dominan sekitar 70%, walaupun demikian kedudukan mata pelajaran agama memegang peranan yang amat penting seperti yang tertera dalam Kurikulum Madrasah Aliyah tahun 1984, menyatakan bahwa mata pelajaran agama dikelompokkan sebagai progam inti.[[77]](#footnote-78)

Dalam rangka merealisasikan SKB 3 menteri tersebut, pada tahun 1976 Departemen Agama mengeluarkan kurikulum sebagai standar untuk dijadikan acuan oleh madrasah, baik untuk MI, MTs, maupun Madrasah Aliyah. Kurikulum yang dikeluarkan tersebut juga dilengkapi dengan:

1. Pedoman dan aturan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada madrasah, sesuai dengan aturan yang berlaku pada sekolah-sekolah umum
2. Deskripsi berbagai kegiatan dan metode penyampaian progam untuk setiap bidang studi baik untuk nidang studi agama maupun bidang studi pengetahuan umum.[[78]](#footnote-79)

Adapun hakekat dari SKB Tiga Menteri itu adalah:

1. Ijazah madrasah mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah lebih umum yang setingkat.
2. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat atas
3. Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.[[79]](#footnote-80)

Usaha untuk menyempurnakan madrasah dan menyusun kembali kurikulum madrasah, perlu memperhatikan fungsi utama madrasah sebagai lembaga pendidikan, yaitu: menciptakan situasi belajar secara optimal agar anak didik /siswa dapat mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang ditetapkan. Hal ini berarti, bahwa mutu pengetahuan, kecerdasan, sikap dan ketrampilan yang menjadi dan penguasaan anak didik, atau tamatan, ditentukan oleh kualitas proses belajar yang dilami oleh anak didik.

Sebagaimana halnya dengan perkembangan kurikulum madrasah yang pada mulanya hanya mengajarkan mata pelajaran agama saja, mengalami perubahan demi perubahan mengikuti perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu periode selanjutnya adalah periode dimana madrasah telah berada dibawah aturan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan diatur pula oleh Peratuaran Pemerintah yang berkaitan dengan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.

Dengan berlakunya Undang -Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta seperangkat peraturan-peraturan pelaksanaannya, maka pendidikan di madrasah banyak mengacu pada sistem pendidikan nasional, baik menyangkut satuan dan jenjang pendidikan maupun kurikulum pada masing-masing jenjang pendidikannya.[[80]](#footnote-81)

Madrasah pada periode ini berciri khas agama Islam, maka progam yang dikembangkan adalah mata pelajaran yang persis dengan sekolah umum. Sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam diajarkan ilmu pengetahuan agama, seperti aqidah-akhlak, fiqih, quran-hadist, bahasa Arab, SKI.[[81]](#footnote-82)

Sedangkan kurikulum madrasah pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, tidak jauh beda dengan kurikulum madrasah pada Undang -Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hanya saja pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional lebih kuat dan kokoh karena penyebutan nomenklatur madrasah masuk dalam batang tubuh undang-undang.[[82]](#footnote-83)

1. Haidar Putra Dauly, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 57-58 [↑](#footnote-ref-2)
2. Ahmad Fatoni, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, (Jakaarta: PT Bina Ilmu, 2004), hlm 50-51 [↑](#footnote-ref-3)
3. Haidar Putra Dauly, *Sejarah Pertumbuhan* …, hlm. 44 [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid*., hlm. 44 [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid.*, hlm. 58 [↑](#footnote-ref-6)
6. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*…, hlm. 76 [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid.,* hlm. 105 [↑](#footnote-ref-8)
8. Imam Bawani, *Segi-Segi Pendidikan Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1987), hlm. 18 [↑](#footnote-ref-9)
9. Haidar Putra Dauly, *Sejarah Pertumbuhan* …, hlm. 95 [↑](#footnote-ref-10)
10. Zuhairini, dan Abdul Ghofir, *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. (Malang: Fakultas Tarbiyah Universitas Negeri Malang dan Universitas Negeri Malang UM Press, 2004), hlm. 55 [↑](#footnote-ref-11)
11. Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren,*  (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 44 [↑](#footnote-ref-12)
12. Zuhairini, dan Abdul Ghofir, *Metodologi Pembelajaran …,* hlm. 55 [↑](#footnote-ref-13)
13. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesi,a* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 114 [↑](#footnote-ref-14)
14. Haidar, Putra Dauly, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan,* Op. Cit. hlm. 96 [↑](#footnote-ref-15)
15. Muchlis Sjahid, dan Triyo Supriyatno, *Konsep Pembaruan Pendidikan Muhammadiyah Tahun 1912-1942,* (Malang: Universitas Negeri Malang dan P3M Malang, 2003), hlm. 63 [↑](#footnote-ref-16)
16. Haidar Putra Dauly, *Sejarah Pertumbuhan …,* hlm. 97 - 98 [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid*., hlm. 98-99 [↑](#footnote-ref-18)
18. *Ibid.*, hlm. 99 [↑](#footnote-ref-19)
19. Zuhairini, dan Abdul Ghofir, *Metodologi Pembelajaran …,* hlm. 32 [↑](#footnote-ref-20)
20. Haidar Putra Dauly, *Sejarah Pertumbuhan* …, hlm. 100 [↑](#footnote-ref-21)
21. Enumg K, Rukiati dan Fenti Himawati, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia,* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 34 [↑](#footnote-ref-22)
22. Haidar Putra Dauly, *Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 47 [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid.*, hlm. 47-48 [↑](#footnote-ref-24)
24. Haidar Putra Dauly, *Sejarah Pertumbuhan …,* hlm. 112 [↑](#footnote-ref-25)
25. Tadjab, *Perbandingan Pendidikan* (Surabaya: Karya Abditama, 1994), hlm. 93 [↑](#footnote-ref-26)
26. *Ibid.*, hlm. 114 [↑](#footnote-ref-27)
27. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 17*, dalam *http: //www. Jakarta teachers.com/ 821. html*, diakses tanggal 20 Juli 2011. [↑](#footnote-ref-28)
28. *Ibid*, *pasal 18* [↑](#footnote-ref-29)
29. Abu Bakar Muhammad, *Pembinaan Manusia Dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas Surabaya Indonesia, 1994), hlm. 20 [↑](#footnote-ref-30)
30. M. Dahlan Al-Barry dan Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer,* (Surabaya: Arloka, 1994), hlm. 329 [↑](#footnote-ref-31)
31. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran,* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 280 [↑](#footnote-ref-32)
32. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* …, hlm. 598 [↑](#footnote-ref-33)
33. Iffah Rosyidah, *Manajemen Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SMP Ar-Risalah Salafi terpadu Lirboyo Kediri,* (Skripsi*:* Tidak Diterbitkan, Universitas Islam Negeri Malang, 2007), hlm. 34 [↑](#footnote-ref-34)
34. *Ibid*., hlm. 34 [↑](#footnote-ref-35)
35. *Ibid.*, hlm. 35-36 [↑](#footnote-ref-36)
36. *Ibid.*, hal. 37 [↑](#footnote-ref-37)
37. Iffa Afdlolina, *Implementasi Manajemen Pendidikan dalam Mneingkatkan Mutu Pendidikan di SMPN 03 Batu, Skripsi*, (Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Malang, 2005), hlm. 29-31 [↑](#footnote-ref-38)
38. *Ibid*, hlm. 48-49 [↑](#footnote-ref-39)
39. Nana Syaodih Sukmadinata, dkk. *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (Konsep, Prinsip dan Instrumen)*, ( Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 9-11 [↑](#footnote-ref-40)
40. *Ibid.*, hlm. 13 [↑](#footnote-ref-41)
41. H. A. R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 64-70 [↑](#footnote-ref-42)
42. H. A. R. Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2004), hlm 80-81 [↑](#footnote-ref-43)
43. Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, (Surabaya: PSAPM, 2004), hlm. 200 [↑](#footnote-ref-44)
44. Khaeruddin dkk., *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Konsep dan Implementasinya di Madrasah*, (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2007), hlm. 15-20 [↑](#footnote-ref-45)
45. Malik Fadjar, *Visi Pembaruan Pendidikan Islam,* (Jakarta: LP3NI, 1998), hlm. 68 [↑](#footnote-ref-46)
46. Zahara Idris dan Lisma Jamal, *Pengantar Pendidikan 2,* (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), hlm. 70 [↑](#footnote-ref-47)
47. Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan,* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.189 [↑](#footnote-ref-48)
48. Zahara Idris dan Lisma Jamal, *Pengantar Pendidikan* …, hlm. 70 [↑](#footnote-ref-49)
49. Cece Wijaya,dkk., *Upaya Pembaharuan dalam Pendidikan dan Pengajaran* (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 1992), hlm. 9 [↑](#footnote-ref-50)
50. Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2004), hlm. 251 [↑](#footnote-ref-51)
51. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Ussaimin, *Prinsip-Prinsip Dasar Keimanan*, terj. Ali Makhtum Assalamy, (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2003), hlm. 82 [↑](#footnote-ref-52)
52. Wasty Soemanto, *Petunjuk untuk Pembinaan Pendidikan,* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 63 [↑](#footnote-ref-53)
53. C. Rhoviq DIP. T, *Menyusuri Jalur Pembangunan dan Inovasi Pendidikan d kawasan Dunia Ketiga,* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 125 [↑](#footnote-ref-54)
54. Zahara Idris dan Lisma Jamal, *Pengantar Pendidikan* …, hlm. 71 [↑](#footnote-ref-55)
55. Munardji, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakart: PT Bina Ilmu, 2004), hlm. 6 [↑](#footnote-ref-56)
56. Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain System Pembelajaran*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama, 2009), hlm. 2 [↑](#footnote-ref-57)
57. Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu* …, hlm. 124 [↑](#footnote-ref-58)
58. Tim dosen FIP-IKIP Malang, *Pengantar Dasar-Dasar Pendidikan*  (Surabya: Usaha Nasional, 2003), hlm. 202-208 [↑](#footnote-ref-59)
59. *Ibid.*, hlm. 204-205 [↑](#footnote-ref-60)
60. *Ibid*., hlm. 208 [↑](#footnote-ref-61)
61. Kjell Skogen, “Inovasi untuk Inklusi–Pengenalan terhadap Proses Perubahan” dalam [*http://www.idp-europe.org/indonesia/buku-inklusi/Inovasi\_Inklusi.php*](http://www.idp-europe.org/indonesia/buku-inklusi/Inovasi_Inklusi.php), diakses tanggal 28 Juli 2011. [↑](#footnote-ref-62)
62. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-63)
63. Cece Wijaya,dkk., *Upaya Pembaharuan* …, hlm. 8 [↑](#footnote-ref-64)
64. Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 81 [↑](#footnote-ref-65)
65. Cece Wijaya,dkk., *Upaya Pembaharuan* …, hlm. 8 [↑](#footnote-ref-66)
66. Wasty Soemanto, *Petunjuk untuk Pembinaan …,* hlm 63 [↑](#footnote-ref-67)
67. H. A.R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Indonesia Tera, 1999), hlm. 351 [↑](#footnote-ref-68)
68. *Ibid.*, hlm. 351 [↑](#footnote-ref-69)
69. Idris HM. Noor,“Sebuah Tinjauan Teoritis Tentang Inovasi Pendidikan di Indonesia” dalam [*http://www.pdk.go.id/balitbang/Publikasi/Jurnal/No\_026/sebuah\_tinjauan\_teoritis\_Idris.htm*](http://www.pdk.go.id/balitbang/Publikasi/Jurnal/No_026/sebuah_tinjauan_teoritis_Idris.htm)*,*, diakses tanggal 25 Agustus 2011. [↑](#footnote-ref-70)
70. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-71)
71. Cece Wijaya, dkk., *Upaya Pembaharuan* …, hlm. 23-24 [↑](#footnote-ref-72)
72. Enumg K, Rukiati dan Fenti Himawati, *Sejarah Pendidikan* …, hlm. 119 [↑](#footnote-ref-73)
73. Zuhairini dkk. *Sejarah Pendidikan Islam,* (Jaksrta: Bumi Aksara dan DEPAG, 1995), hlm. 217 [↑](#footnote-ref-74)
74. Haidar Putra Dauly, *Sejarah Pertumbuhan* …, hlm. 102 [↑](#footnote-ref-75)
75. Enumg K, Rukiati dan Fenti Himawati, *Sejarah Pendidikan* …, hlm. 120 [↑](#footnote-ref-76)
76. A. Hamid, Syarief, *Pengenalan Kurikulum Madrasah dan Sekolah,* (Bandung: Citra Umbara, 1995), hlm. 4 [↑](#footnote-ref-77)
77. Haidar Putra Dauly, *Sejarah Pertumbuhan* …, hlm. 103 [↑](#footnote-ref-78)
78. Enumg K, Rukiati dan Fenti Himawati, *Sejarah Pendidikan* …, hlm. 124 [↑](#footnote-ref-79)
79. A. Hamid, Syarief, *Pengenalan Kurikulum*  …, hlm. 144 [↑](#footnote-ref-80)
80. *Ibid.*, hlm. 264 [↑](#footnote-ref-81)
81. Haidar Putra Dauly, *Pendidikan Islam* …, hlm. 57 [↑](#footnote-ref-82)
82. Haidar Putra Dauly, *Sejarah Pertumbuhan* …, hlm. 103 [↑](#footnote-ref-83)